

Trunojoyo Discussion Club



Madura yang dikenal dengan Pulau Garam karena dapat menghasilkan garam melimpah dan mampu memberikan sumbangsih pada kebutuhan garam nasional, namun akhir-akhir ini kondisi produksi garam khususnya di madura mengalami kemerosotan yang sangat tinggi.

Ada berbagai hal yang menyebabkan menurunnya produksi petani garam di Madura, diantaranya adalah Kebijakan Pemerintah, Mafia Garam, dan Pemangku kepenetangan yang kurang berpihak pada petani garam.

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebagai perguruan tinggi yang fokus pada 6 sektor potensial madura dan juga memiliki tugas dalam memecahkan permasalahan di masyarakat, maka upaya dalam memberikan sumbangsih pemikiran terus dilakukan.

Salah satu upaya tersebut dengan dilaksanakannya Trunojoyo Discussion Club (TDC) oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) yang mengangkat tema "Kebijakan Pengelolaan Garam Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat Madura" pada 10/04/2018.

Bertempat di Aula Graha Utama Lt.10, Wakil Dekan II Dr. Syafi', S. H., M. H. Dalam sambutannya mengapresiasi acara tersebut, sebab menurutnya acara tersebut sangat bermanfaat dalam memperkaya wawasan dan berfikir kritis.

Sementara itu, membuka acara Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan H. Boedi Mustiko, S. H., M. Hum. mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada narasumber dan mengangkat garam. Sebab menurutnya, garam memiliki manfaat yang sangat luar biasa, tidak hanya sebagai konsumsi, industri, dan penelitian, tapi juga berbagai inovasi.

UTM sebagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk Kemenristekdikti sebagai Pusat Unggulan Inovasi (PUI) Garam, telah menghasilkan inovasi garam berupa konsumsi, industri, penelitian, dan garam sabun untuk spa, ini sangat luar biasa" Paparnya

Mudah-mudahan diskusi ini dapat menghasilkan berbagai pemikiran yg mampu memberikan manfaat baik kepada universitas dan masyarakat luas khususnya di Madura. Imbuhnya

Sebanyak 200 lebih peserta mengikuti acara yang menghadirkan narasumber dari PT. Garam, Disperindak Pemprov Jatim, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa-Timur, Anggota DPRD Kab. Sumenep dari Komisi II dan Aliansi Masyarakat Garam Madura.

Banyak hal yang dibahas pada diskusi tersebut, meliputi kebijakan pemerintah tentang

pergaraman, aturan yang mengatur antara petani dan unit usaha baik BUMN atau swasta. Disamping itu, disinggung juga perihal berbagai temuan impor garam yang seringkali melumpuhkan para petani garam.